

PEMERINTAH KOTA
BATAM



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kota Batam



2026

DP3AP2KB



Kantor Gedung Bersama, Jl. Raja Isa No. 17 Batam Center
Email : p3ap2kb@batam.go.id



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

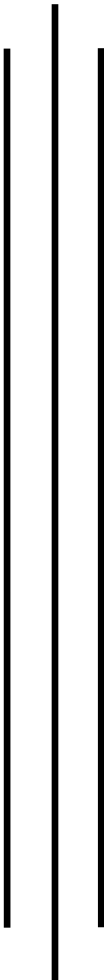
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XIX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 5

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 54

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 54

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH 57

BAB IV PENUTUP 99

4.1 Catatan Penting..... 99

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 99

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2026 s/d Triwulan II 54

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah . 57

Tabel 3.2 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2026 62

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Agustus 2026
Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batam



Nurzalie,AP, S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. penutup.

Adapun Tema Pembangunan Kota Batam pada perubahan RKPD 2026 adalah **“Transformasi Berbasis Inovasi dan Investasi”** dan prioritas pembangunan kota Batam yang relevant dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam terkait prioritas :

1. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing;
2. Impelentasi reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, tambahan terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2003 tentang Pengalihan sebagian Tugas Dinas Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota)
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-861 Tahun 2026 mengatur tentang Perubahan Empat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
13. Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1721).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada TW II tahun 2026 tidak ada

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja berupa persentase terpenuhinya dukungan terhadap urusan pemerintahan, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 50.63%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sudah terealisasi 50.06%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sudah terealisasi 80.99%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sudah terealisasi 83.72%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sudah terealisasi 49.85%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sudah terealisasi 49.45%

* Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam dengan indikator program Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam dengan target capaian 12.20%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 7%

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sudah terealisasi 78%
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota sudah terealisasi 50%

* Program Perlindungan Perempuan dengan indikator program Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 49%

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Pengaduan yang

- ditindaklanjuti, dengan target capaian 50%. Sudah terealisasi 25% hingga Triwulan II
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja sebesar 50% sudah terealisasi 23%.
 - * Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator program Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam, dengan target capaian sebesar 4.7%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 2%
 - * Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sudah dengan indikator kegiatan Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif, dengan target capaian 73%. Sudah terealisasi 33% hingga Triwulan II.
 - * Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator program dengan indikator program Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 75%
 - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap, dengan target capaian 85%. Sudah terealisasi 64% hingga Triwulan II.
 - * Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Persentase capaian kluster Kota Layak Anak, dengan target capaian sebesar 75%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 34%.
 - Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA, dengan target capaian 75%. Sudah terealisasi 34 % hingga Triwulan II.
 - * Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator program Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 48%.
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti/yang dilayani), dengan target capaian 70%. Sudah terealisasi 35% hingga Triwulan II.
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti/Dirujuk, dengan target capaian 60%. Sudah terealisasi 27% hingga Triwulan II.
 - Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti, dengan target capaian 100%. Sudah terealisasi 45% hingga Triwulan II.
 - *Program Pengendalian Penduduk dengan indikator program Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK, dengan target capaian sebesar 62%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 33%.
 - Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan indikator kegiatan Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan, dengan target capaian 62%. Sudah terealisasi 25% hingga Triwulan II.
 - Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS

yang mendapatkan sosialisasi, dengan target capaian 65. Sudah terealisasi 36% hingga Triwulan II.

* Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator program Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)/ Unmeet Need, dengan target capaian sebesar 81.65%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 38%.

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator kegiatan persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi, dengan target capaian 54%. Sudah terealisasi 25% hingga Triwulan II.
- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan indikator kegiatan Persentase tenaga lini/kader yang aktif, dengan target capaian 70%. Sudah terealisasi 28% hingga Triwulan II
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB, dengan target capaian 85%. Sudah terealisasi 38% hingga Triwulan II
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator kegiatan Presentase kampung KB yang aktif, dengan target capaian 74%. Sudah terealisasi 73% hingga Triwulan II.

* Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator program Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina, dengan target capaian sebesar 70%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 35%.

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kegiatan Persentase Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga 74%. Sudah terealisasi 34% hingga Triwulan II
- Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kegiatan Persentase Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan Pemantauan dan Pendampingan), dengan Indikator Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan target capaian 72%. Sudah terealisasi 37% hingga Triwulan II

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada TW II tahun 2025 tidak ada

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, da Keluarga Berencana Kota Batam

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5		6		7=6/5*100%	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			16.833.033.894		6.774.482.362	54,23	40,25
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.299.753.394		6.310.269.762	46,84	44,13
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Nilai)	74,37		38		51,1	
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	91		46		50,55	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		0		0	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0	0
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0	0
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		0		0	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.596.112.194		6.001.675.735	62,5	44,14

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya layanan administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		62		100	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		3		25	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.545.572.194		5.977.535.735	100	44,13
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		62		100	
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50.540.000		24.140.000	25	47,76
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		3		25	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.405.800		80.704.114	25	53,66

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		6		50	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.837.900		2.975.000	100	61,49
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.788.900		23.943.500	0	63,36
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.016.200		4.262.000	0	60,75
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.000.000		-	0	0
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.996.800		-	0	0
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			81.766.000		49.523.614	50	60,57
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		6		50	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			265.800.400		116.580.000	60,39	43,86
		Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD (Perangkat Daerah)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	33		21		63,64	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		8		57,14	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			110.235.500		27.680.000	63,64	25,11
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	33		21		63,64	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			155.564.900		88.900.000	57,14	57,15
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		8		57,14	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.450.000		22.709.913	12,5	20,56
		Tersedianya jasa penunjang urusan (Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		6		25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		0		0	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			108.650.000		22.709.913	25	20,9

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		6		25	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.800.000		-	0	0
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		0		0	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176.985.000		88.600.000	93,94	50,06
		Terlaksananya pemeliharaan BMD (Perangkat Daerah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33		27		81,82	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			74.130.000		18.795.000	100	25,35
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			73.525.000		51.915.000	100	70,61
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.330.000		17.890.000	81,82	61
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33		27		81,82	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			509.927.600		218.145.600	75	42,78
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam (Persentase)	12,20		7		57,38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			45.000.000		51.722.400	100	114,94
		Meningkatnya pembinaan PPRG dan Gap GBS di lingkup OPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	45		45		100	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			45.000.000		51.722.400	100	114,94
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	45		45		100	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			464.927.600		166.423.200	50	35,8

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya pembinaan soft skill perempuan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	400		200		50	
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			464.927.600		166.423.200	50	35,8

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	400		200		50	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			346.621.000		-	12,5	0
		Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan (Persentase)	100		49		49	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			220.000.000		-	25	0
		Meningkatnya tindaklanjut pengaduan kekerasn perempuan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1		25	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			220.000.000		-	25	0
		Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1		25	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			126.621.000		-	0	0
		Meningkatnya upaya layanan rujukan kekerasan perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	41		0		0	
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			126.621.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	41		0		0	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			828.636.900		170.810.000	45	20,61
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam (%)	4,6		2		43,48	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			828.636.900		170.810.000	45	20,61

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya pembinaan kader PKK dan perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200		90		45	
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.			828.636.900		170.810.000	45	20,61

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200		90		45	
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			45.000.000		32.557.000	33,33	72,35
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG (Persentase)	100		75		75	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.000.000		32.557.000	33,33	72,35

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terupdatenya data gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3		1		33,33	
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			45.000.000		32.557.000	33,33	72,35
		Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3		1		33,33	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			480.000.000		42.700.000	44,96	8,9
		Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase capaian kluster kota layak anak (%)	75		35		46,67	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			480.000.000		42.700.000	44,96	8,9

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya lembaga layanan anak yang sesuai standar PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	456		205		44,96	
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			480.000.000		42.700.000	44,96	8,9

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	456		205		44,96	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			323.095.000		-	118,25	0
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan (%)	100		48		48	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			101.500.000		-	131,67	0
		Meningkatnya tindaklanjut pengaduan anak	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	60		79		131,67	
	2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			101.500.000		-	131,67	0
		Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	60		79		131,67	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			152.575.000		-	223,08	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	52		116		223,08	
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			152.575.000		-	223,08	0
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	52		116		223,08	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.020.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya pembinaan bagi lembaga penyedia layanan anak	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	15		0		0	
	2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.020.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	15		0		0	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.504.229.200		1.986.971.739	31,47	26,48
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			354.600.000		19.200.000	16,67	5,41
		Terkendal inya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Stekeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK (%)	62		34		54,84	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			45.000.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya kebijakan GDPK yang diakomodir OPD	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			45.000.000		-	0	0
		Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			309.600.000		19.200.000	25	6,2
		Meningkatnya pemanfaatan dat SIGA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12		0		0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12		6		50	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			60.000.000		-	0	0
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12		0		0	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			249.600.000		19.200.000	50	7,69
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12		6		50	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.249.236.800		531.611.739	33,5	16,36
		Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (%)	81,65		38		46,54	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.112.316.800		166.243.739	20	14,95
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0		6		0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	4		2		50	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4		0		0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4		0		0	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	4		2		50	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	96		0		0	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			-		56.400.000	0	0
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0		6		0	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			628.316.800		97.519.739	50	15,52

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	4		2		50	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			240.000.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4		0		0	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			34.000.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4		0		0	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			110.000.000		12.324.000	50	11,2
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	4		2		50	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			100.000.000		-	0	0
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	96		0		0	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			512.000.000		-	40,06	0
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	619		248		40,06	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			512.000.000		-	40,06	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	619		248		40,06	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.473.720.000		312.862.000	31,66	21,23
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12		6		50	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	725		326		44,97	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya (Laporan)	12		0		0	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya			158.400.000		41.903.000	50	26,45

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12		6		50	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.222.620.000		270.959.000	44,97	22,16
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	725		326		44,97	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			92.700.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12		0		0	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			151.200.000		52.506.000	100	34,73
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	13		13		100	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			151.200.000		52.506.000	100	34,73
		Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	13		13		100	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.900.392.400		1.436.160.000	37,5	36,82
		Meningkatnya cakupan kelompok bina ketahanan keluarga yang aktif	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Persentase)	67		37		55,22	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			309.992.400		-	25	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya pembinaan ketahanan keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20		0		0	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	12		6		50	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			130.000.000		-	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20		0		0	
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			179.992.400		-	50	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	12		6		50	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3.590.400.000		1.436.160.000	50	40

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	12		6		50	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	12		6		50	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			1.632.000.000		-	50	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	12		6		50	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			1.958.400.000		1.436.160.000	50	73,33
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	12		6		50	
	Jumlah				24,337,263,094		8,761,454,101		
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							45,02	36

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja s.d Triwulan II (S.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realiasi Target (%)	
			Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					52,53	
			Predikat Kinerja					Rendah	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
	Sasaran PD	Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Ketimpangan Gender	Persentase	0.1926	Persentase	0.10	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persentase	67.43	Persentase	30.60	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persentase	7.75	Persentase	3.69	
4	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2.14	Persentase	1.05	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase	93.16	Persentase	47.29	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- 1. Kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan Kota Batam
- 2. Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan

3. Tingkat Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak
4. Kelestarian Ber-KB
5. Pernikahan Remaja Usia Dini
6. Angka Stunting Kota Batam
7. Peningkatan Kualitas Kelompok Kegiatan untuk melakukan KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera
8. Kompetensi SDM Internal
9. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Lintas Sektoral
10. Belum optimalnya implementasi Grand Design Kependudukan
11. Belum optimalnya edukasi tentang perencanaan keluarga
12. Masih kurangnya tenaga lini lapangan KB yang mendukung pelaksanaan program bangga kencana di tingkat kecamatan dan kelurahan
13. Belum optimalnya edukasi dini tentang kesehatan reproduksi dan generasi berencana bagi remaja kota Batam
14. Belum optimalnya pelaksanaan dan pembinaan kelompok ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga sejahtera

Terkait isu strategis dalam tugas dan fungsi yang diemban Dinas P3AP2KB kota Batam berupaya mewujudkan tujuan melalui 2 (dua) indikator tujuan yang ingin dicapai terkait peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai representasi keberhasilan dalam mencapai Kesetaraan Gender serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak menuju Keluarga yang unggul dan berkarakter. Berdasarkan capaian di tahun 2025 Perempuan unggul pada harapan hidup 76.09, lebih tinggi 3.89 point dari harapan hidup laki-laki dan harapan lama sekolah 13.63 lebih tinggi 0.38 point dari pada harapan lama sekolah laki-laki. Sedangkan pada dimensi rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan IPM perempuan masih dibawah capaian Laki-laki. Kelima dimensi ini sebagai tolok ukur perhitungan indeks pembangunan gender yang pada tahun 2025 tercapai sebesar 95.72 diatas capaian nasional pada angka 91.85. Sumbangsih pencapaian ini berkaitan erat dengan perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, ketenagaan kerjaan yang diharapkan tetap bersinergi positif dalam upaya peningkatan IPG Kota Batam pada tahun-tahun mendatang.

Sedangkan dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga perlu diadakan perbaikan dan pembangunan dasar fundamental tatanan keluarga dan masyarakat kota Batam yang di wujudkan melalui program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Program Pengendalian Penduduk yang dalam hal ini berupaya mengintervensi angka stunting kota Batam melalui peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga sebagai proyeksi pencapaian dalam ketiga dimensi/pilar pembangunan keluarga yaitu : Indeks Ketentraman, Indeks Kemandirian dan indeks Kebahagiaan. Pada tahun 2025 Indeks Pembangunan keluarga Kota Batam tercapai pada angka 67.26.

Upaya dasar dalam pembangunan keluarga adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perencanaan dini dalam pembangunan sebuah keluarga yang dalam hal ini telah diintervensi oleh Dinas P3AP2KB untuk membangun keluarga ideal dengan jumlah 2 anak cukup, melahirkan anak yang sehat, bebas stunting sehingga angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk berlangsung dinamis dengan ketersediaan infrastruktur sarana prasarana kota Batam. Melalui penyelenggaraan program KB tahun 2025 kepada PUS Kota Batam yang

tercapai CPR sebesar 70,23. Demikian halnya pembinaan Kelompok ketahanan keluarga BKB, BKR, UPPKA, BKL yang diselenggarakan dalam upaya penguatan dasar mental keluarga, mulai dari pembinaan kepada keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia dan upaya peningkatan usaha keluarga sejahtera. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan kepada 485 Kelompok ketahanan keluarga, 229 BKB, 40 BKR, 42 BKL. Pembinaan Kelompok ketahanan keluarga ini juga sangat fundamental dalam upaya pencegahan stunting di kota Batam yang diupayakan melalui perencanaan keluarga dan pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang didukung oleh dana alokasi khusus untuk pembentukan 544 Tim Pendamping Keluarga bagi calon pengantin, ibu hamil di tingkat kelurahan dan kecamatan Se-Kota Batam. Dalam hal ini intervensi Dinas P3AP2KB berkontribusi dalam penurunan angka stunting Kota Batam yang saat ini angka Stunting pada posisi 677 orang dan menurun dari angka tahun 2025 pada angka 727 orang.

Dan dalam upaya sinergitas kebijakan Pembangunan Kependudukan telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan GDPK Kota Batam dalam hal ini melalui intervensi Dinas P3AP2KB Kota Batam merumuskan kebijakan pembagunan kependudukan lintas stake holder dan diharapkan menjadi mode design pilar kependudukan kota Batam periode 2025-2029.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran di tingkat Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun mendatang. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,74	95,76	95,78	95,80	95,82	95,84
			Indeks Pembangunan Keluarga	67.28	67.30	67.32	67.34	67.36	67.38
1		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	0,1928	0,1926	0,1924	0,1922	0,1920	0,1918

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		Meningkatnya Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,410	67,430	67,450	67,470	67,490	67,510
3		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Tindakan Kekerasan	Kekerasan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	7,8	7,75	7,7	7,65	7,6	7,58
4		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
5		Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam	92.16	93.16	94.16	95.16	96.16	97.16

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam terdapat perubahan dan/atau penyesuaian nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-1-861 Tahun 2026 dan pemetaan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOKKB dan DAK Non Fisik BOPPA Tahun 2026, diuraikan dalam rincian dan table di bawah ini.

Adapun perubahan Program dan kegiatan Perubahan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam pada Tahun 2026 yang didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan penambahan anggaran yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya penambahan belanja modal untuk menunjang kegiatan administrasi kedinasan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - 2) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Sedangkan untuk Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pengurangan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam penyesuaian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 terhadap kebutuhan berjalan, yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya penyesuaian gaji untuk pegawai yang pensiun dan mutasi
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Perlindungan Perempuan
 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak
 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sedangkan kegiatan yang mengalami pemetaan nomenklatur menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 sebagai berikut ini :

1. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
 - 1) Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;

- 1) Layanan Gelar Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- 3) Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- 4) Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Layanan Pendampingan korban bagi Perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- 1) Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/Kota

c. Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- 1) Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota
- 2) Layanan Medikolegal bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/Kota
- 3) Layanan rumah perlindungan bagi korban kekerasan tingkat kabupaten/kota

Tabel 3.2

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24,337,263,093.66	20,886,482,854	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							16,401,760,493.66	14,812,841,954	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	1. 76 Nilai 2. 91 Nilai	74,37 Angka 91 Poin	14,147,675,993.66	12,807,078,854	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/ KOTA							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100 %	13,596,112,194	11,415,096,154	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	13,545,572,193.66	11,366,505,354	Penyesuaian kebutuhan pegawai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	50,540,000	48,590,800	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	138,450,700	113,609,100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1 Paket	1 Paket	4,837,900	4,837,900	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		ngan Bangunan Kantor	ngan Bangunan Kantor	an Bangunan Kantor yang Disediakan	an Bangunan Kantor yang Disediakan					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	27,833,800	27,833,800	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,016,200	4,884,600	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11,996,800	11,996,800	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	81,766,000	59,056,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase realisasi pengadaan	Persentase realisasi pengadaan	100%	100%	187,738,100	964,338,600	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan					
		-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	1 Unit	-	500,000,000	Menyesuaikan kebutuhan (Mobil Dinas yang lama sudah Tidak Layak)
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	17 Unit	77,125,200	37,641,900	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	14 Unit	110,612,900	161,704,700	Menyesuaikan kebutuhan
		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	1 Unit	-	264,992,000	Urgensi kebutuhan renovasi ruang rapat untuk kinerja layanan internal dan lintas opd
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang	100%	100%	58,150,000	58,150,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	sesuai perencanaan	sesuai perencanaan					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57,250,000	57,250,000	
		Penyediaan Jasa Umum Kantor	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900,000	900,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	167,225,000	255,885,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	74,130,000	43,540,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	73,525,000	192,775,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	19,570,000	19,570,000	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	13%	12.2 %	509,927,600	528,611,100	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	84%	82 %	45,000,000	79,649,700	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	45 Dokumen	45 laporan	45,000,000	79,649,700	Menyesuaikan kebutuhan kegiatan
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	82%	80 %	464,927,600	448,961,400	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	400 orang	400 orang	464,927,600	448,961,400	Menyesuaikan kebutuhan kegiatan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100 %	220,000,000	257,430,000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50 %	220,000,000	219,125,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	220,000,000	174,989,500	
		-	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/Kota	-	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat tingkat Provinsi, masyarakat serta Kabupaten/Kota	-	15 Lembaga	-	44,135,500	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	-	Persentase lembaga layanan Perempuan yang dibina	-	50%	-	38,305,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
			Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		-	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/Kota	-	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-	40 Orang	-	38,305,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5%	4.7 %	828,636,900	649,967,800	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina	74%	73 %	828,636,900	649,967,800	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota							
		Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kabupaten/Kota	200 orang	200 Orang	828,636,900	649,967,800	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan	100%	100 %	45,000,000	60,886,700	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		DATA GENDER DAN ANAK	DATA GENDER DAN ANAK	Data gender dan Anak	Data gender dan Anak					
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif	85%	85 %	45,000,000	60,886,700	
		Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	45,000,000	60,886,700	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian kluster kota layak anak	Persentase capaian kluster kota layak anak	78%	75 %	480,000,000	419,948,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA	78%	75 %	480,000,000	419,948,000	
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	456 Lembaga	456 Lembaga	480,000,000	419,948,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100 %	170,520,000	88,919,500	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti	70%	70 %	101,500,000	57,864,500	
		-	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/Kota	-	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kabupaten/Kota	-	3 Kegiatan	-	57,864,500	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	60 Orang	-	101,500,000	-	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang dibina	Persentase lembaga layanan anak yang dibina	60%	50%	69,020,000	31,055,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	15 Lembaga	-	69,020,000	-	
		-	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/Kota	-	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-	70 Orang	-	31,055,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7,504,229,200	5,663,868,900	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	64%	62 %	354,600,000	300,640,000	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan	Persentase OPD yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan	64%	62 %	45,000,000	34,240,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	34,240,000	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data SIGA	Persentase pemanfaatan data SIGA	70%	65 %	309,600,000	266,400,000	
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	-	60,000,000	-	
		Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	249,600,000	38,400,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		-	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	Jumlah Laporan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Laporan	12 Dokumen	-	228,000,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)/ Unmeed Need	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)/ Unmeed Need	82 % 10,90%	81,65 % 10,9 %	3,249,236,800	1,474,976,200	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang ber KB baru	Persentase PUS yang ber KB baru	56 %	54 %	1,112,316,800	335,147,200	
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada	-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana	-	96 Organisasi	-	100,000,000	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Stakeholders dan Mitra Kerja		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	110,000,000	36,563,200	
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	-	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	-	4 Dokumen	-	34,000,000	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		serta Media Luar Ruang		Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	4 Dokumen	-	240,000,000	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan	628,316,800	298,584,000	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif	Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif	70%	70%	512,000,000	48,000,000	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	619 Orang	619 Orang	512,000,000	48,000,000	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	86 %	85 %	1,473,720,000	1,038,723,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	158,400,000	171,000,000	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	725 Orang	725 Orang	1,222,620,000	867,723,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	12 Laporan	-	92,700,000	-	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB yang aktif	Persentase kampung KB yang aktif	76 %	74 %	151,200,000	53,106,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kampung	13 Kampung	151,200,000	53,106,000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	90 %	70 %	3,900,392,400	3,888,252,700	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	76 %	74 %	309,992,400	297,852,700	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	13 unit	130,000,000	52,275,000	
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	12 Laporan	179,992,400	245,577,700	Menyesuaikan kebutuhan kegiatan

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Akseptor (UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan	74 %	72 %	3,590,400,000	3,590,400,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	12 laporan	1,958,400,000	3,590,400,000	
		Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko	-	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko	-	12 laporan	-	1,632,000,000	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran		Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							431,273,400	409,772,000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	1. 76% 2. 91%	74,37 Angka 91 Poin	152,077,400	124,076,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	11,955,100	11,955,100	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9,955,100	9,955,100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	52,300,000	37,500,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51,400,000	36,900,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900,000	600,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase realisasi pengadaan barang milik	Persentase realisasi pengadaan barang milik	100%	100%	78,062,300	64,860,900	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah	daerah sesuai rencana kebutuhan	daerah sesuai rencana kebutuhan					
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	33,110,300	19,908,900	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	44,952,000	44,952,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	9,760,000	9,760,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	9,760,000	9,760,000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	126,621,000	128,821,000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang dirujuk	50%	50%	126,621,000	128,821,000	
		-	Layanan Gelar Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	-	2 Orang	-	4,550,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
					Tingkat Kabupaten/Kota					
		-	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Korban yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan bagi tingkat Kabupaten/Kota	-	2 Orang	-	3,710,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		-	Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	15 Orang	-	73,390,500	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		-	Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	-	50 Orang	-	32,500,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	86 Orang	41 Orang	126,621,000	4,770,500	
		-	Layanan Pendampingan korban bagi Perempuan korban kekerasan tingkat	-	Jumlah perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan	-	60 Orang	-	9,900,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
			Kabupaten/Kota		korban tingkat Kabupaten/Kota					
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	152,575,000	156,875,000	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	152,575,000	156,875,000	
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	258 Orang	267 Orang	152,575,000	14,696,500	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
		-	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	-	Jumlah Anak korban Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	3 Orang	-	5,565,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		-	Layanan Medikolegal bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/Kota	-	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	50 Orang	-	65,000,000	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026
		-	Layanan rumah perlindungan bagi korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	-	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	-	25 Orang	-	71,613,500	Pemetaan Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor : 900.1-861 Tahun 2026

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026			RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	RENJA 2026	PERUBAHAN RENJA 2026	
TOTAL PAGU								24,337,263,093.66	20,886,482,854.00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam yakni Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan rencana kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat proram dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari proram kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian scenario dari dokumen perencanaan unduk daerah (RPJMD) yang akan berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD